

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan mengelola sumberdaya daerah dengan melibatkan segenap pemerintah daerah dan juga seluruh komponen masyarakat dengan cara menjalin hubungan kerja sama yang baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kegiatan perekonomian yang berkembang untuk kesejahteraan rakyat (Arsyad, 2014) . Pembangunan ekonomi di daerah bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaannya berdasarkan suatu rencana dan dilakukan secara terus menerus. Tujuan dari pembangunan salah satunya adalah mengatasi kemiskinan yang ada di daerah-daerah. Secara singkat, kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Suliswanto, 2010).

Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya serta rendahnya indikator indikator pembangunan manusia. Menurut Wahyudi dan Rejekingsih, (2013) penyebab adanya kemiskinan antara lain: (1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah

yang terbatas dan kualitasnya rendah. (2) Kemiskinan muncul akibat dari adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, upahnya pun rendah. (3) Kemiskinan muncul disebabkan oleh perbedaan akses dan modal.

Kecamatan Sungai Kanan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Sungai Kanan terdiri dari 8 desa dan terdapat 14 lingkungan dan 86 dusun, dimana dusun terbanyak terdapat di desa Parimburan yaitu sebanyak 16 dusun, sementara desa yang memiliki dusun paling sedikit adalah desa Batang Nadenggan yaitu sebanyak 4 dusun. Jumlah penduduk di kecamatan Sungai Kanan pada tahun 2018 sebanyak 55.480 jiwa, mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah di bidang pertanian (87,77%) sisanya berada di bidang industri, PNS/TNI/Polri, dan lainnya. Mengenai masalah kemiskinan sejak tahun 2015 kemiskinan di kecamatan Sungai Kanan semakin bertambah setiap tahunnya. Terakhir pada bulan Juli tahun 2019 jumlah penduduk miskin mencapai angka 2172 jiwa. Berikut data jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sungai Kanan Tahun 2015 – 2019 yang lalu.

Tabel 1
Data Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Sungai Kanan Tahun 2015-2019

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk Miskin (JIWA)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Batang Nadenggan	217	220	226	232	237
2.	Huta Godang	259	261	267	273	288
3.	Hajoran	129	132	135	137	141
4.	Marsonja	223	229	233	237	244
5.	Parimburan	136	140	144	146	146
6.	Sabungan	282	287	291	295	298
7.	Sampean	181	185	189	193	195
8.	Ujung Gading	147	149	153	159	164

Sumber : Kantor Camat Sungai Kanan (2020)

Seperti yang kita ketahui pada era pemerintahan Jokowi-JK, memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa-Cita yang di dalamnya terkandung suatu program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Perencanaan program tersebut dilakukan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah dan desa di era sebelumnya yang menyebabkan pembangunan infrastruktur kurang merata. Salah satu programnya adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dimulai sejak 2015 yang diberikan dalam jumlah tertentu kepada tiap desa di tiap kabupaten untuk mengatasi kesenjangan antara penduduk desa dan kota. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang padat karya dan dana tersebut diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi desa. pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam menanggulangi masalah tersebut seperti adanya program selain Dana Desa yaitu Alokasi Dana Desa dan Belanja Daerah.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa, yang

dibuktikan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah \pm Rp 20,7 triliun, dalam APBN 2015 yang telah disalurkan ke 74,093 desa di seluruh Indonesia. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima bertahap. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dan sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam penggunaannya, 30% ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011 : 90).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa serta anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 100 Tahun 2014 Belanja Daerah yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :1) Paling sedikit 70% (\geq 70%) dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2) Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk : Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana keterkaitan dan pengaruh dana desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sungai Kanan. Untuk itu penulis mengambil judul **“Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka diajukan beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Untuk menguji pengaruh alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
3. Untuk menguji pengaruh belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi Universitas Bung Hatta penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta terutama jurusan Ekonomi Pembangunan.
2. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan mengenai Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Belanja Daerah untuk mengurangi tingkat Kemiskinan, khususnya di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
3. Bagi Penulis, untuk melatih kemampuan menulis serta untuk menerapkan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan.
4. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.